

Tantangan Pemberantasan Korupsi Indonesia 2024

Hendi Yogi Prabowo, Ph.D.

Pada tahun 2023, Indonesia berada pada titik penting dalam sejarahnya, menghadapi tantangan dan peluang yang kompleks. Pada tahun 2023, perekonomian Indonesia terus menjadi kekuatan dinamis di kawasan Asia Tenggara. Indonesia mempertahankan tingkat pertumbuhan PDB yang stabil, didorong oleh beragam sektor seperti pertanian, manufaktur, dan jasa. Ekonomi digital juga mengalami ekspansi yang signifikan, dengan berkembangnya startup teknologi yang berkontribusi terhadap posisi Indonesia sebagai pusat teknologi regional. E-commerce, fintech, dan layanan digital lainnya mengalami pertumbuhan pesat, mengubah cara masyarakat Indonesia berbisnis dan mengakses layanan. Revolusi digital ini tidak hanya memberdayakan dunia usaha namun juga meningkatkan kehidupan sehari-hari masyarakat, terutama di wilayah perkotaan dan juga pedesaan.

Di sisi lain, korupsi telah menjadi tantangan yang terus-menerus bagi Indonesia, dan merambah ke berbagai lapisan masyarakat dan organisasi. Pada tahun 2023, Indonesia masih terus bergulat dengan permasalahan korupsi yang kompleks dalam berbagai aspeknya, yang menghambat kemajuan sosial-ekonomi dan mengikis kepercayaan masyarakat.

Selama bertahun-tahun, Indonesia telah mencapai kemajuan yang patut diapresiasi dalam upaya pemberantasan korupsi. KPK telah berhasil menyelidiki dan mengungkap kasus-kasus besar yang melibatkan politisi, birokrat, dan tokoh bisnis. Namun demikian, pada tahun 2023, Indonesia berada pada titik kritis dalam perjuangan melawan korupsi. Tidak hanya karena masih banyaknya kasus – kasus korupsi besar yang ada di Indonesia, namun juga adanya aparat pemerintah yang seharusnya menjadi bagian dari mekanisme pemberantasan korupsi malah terlibat dalam kasus korupsi. Gaya hidup bermewah – mewah yang dipertontonkan oleh para pejabat publik di sejumlah akun media sosial seakan menjadi pertanda atau *red flags* masih adanya banyak permasalahan terkait dengan korupsi di Indonesia.

Salah satu tantangan utama pemberantasan korupsi di Indonesia adalah masih maraknya budaya korupsi yang mengakar kuat di berbagai sektor. Nepotisme, penyuapan, dan penggelapan telah mendarah daging dalam sejumlah praktik birokrasi, sehingga menghambat efektivitas upaya pemberantasan korupsi. Di masa yang akan datang perlu adanya reformasi kelembagaan yang berkelanjutan. Selain itu, penting untuk senantiasa menjaga independensi dan efektivitas lembaga – lembaga yang terkait dengan pemberantasan korupsi, termasuk diantaranya KPK, PPATK, dan BPK. Bagian penting dari reformasi tersebut adalah perubahan budaya organisasi serta pola pikir para aparat pemerintah terutama yang berkecimpung dalam pemberantasan korupsi agar senantiasa menjaga integritas dan akuntabilitasnya. Upaya berkelanjutan untuk meningkatkan transparansi transaksi pemerintah, dan menyederhanakan proses juga birokrasi dapat berkontribusi dalam menciptakan lingkungan yang menghambat praktik korupsi.